



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAWAT DAERAH ALIRAN SUNGAI (SEKARDADU) DI KABUPATEN BANYUWANGI

Suji¹, Puji Erliana Febriyanti², Dina Suryawati³

^{1,2,3} Prodi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember

197006152008121002@mail.unej.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 1 November 2024

Revised date: 14 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

The purpose of this study was to analyze the coordination pattern of the Banyuwangi Regency Government in implementing the River Basin Care School Program (Sekardadu) in Banyuwangi Regency, which was nominated for the Top 30 achievements in the East Java Public Service Innovation Competition (Kovablik) in 2023. This program is an activity that involves cross-sectors of the Education Office by involving students from all levels of education, from elementary school students to college students, and Islamic boarding schools, to jointly care for the rivers around their environment to keep them clean and healthy. The Regional Government Organizations involved in the Sekardadu Program, in addition to the Education Office, are the Irrigation Public Works Office, the Environmental Service, the Public Works and Human Settlements Office, the Agriculture and Food Service, and the Fisheries Service. The qualitative-descriptive research approach, where data collection is through interviews, observations, and documentation. Key informants are determined based on certain considerations and further informants are carried out by snowballing. Data verification was carried out using the source triangulation method and technical triangulation with interactive model data analysis techniques (Miles, Huberman and Saldana; 2014). The results of the study showed that the pattern of regional government coordination in the Sekardadu Program in Banyuwangi Regency ran well and smoothly, both vertically and horizontally, so that it achieved the Top 30 East Java Public Service Innovation Competition (Kovablik) in 2023. The guarantee of the implementation of coordination both vertically and horizontally is by the issuance of the Banyuwangi Regent's Decree No. 188/33/KEP/429.011/2022 concerning the Coordination Team and the Sekardadu Activity Implementation Team in Banyuwangi Regency. Coordination between the Regent and the structures below him and vice versa, as well as coordination between Regional Government Organizations, ran smoothly, both formally and informally, online and offline, both in the office and in the field. So, vertical and horizontal coordination as stated by Hasibuan (2011) can run well and smoothly, resulting in good achievements. The findings, first, educational institutions are still not optimal, so that student participation is still mobilization. Second, there is no budget for consumption for students when implementing the program in the field.

Keywords: Public Service Innovation, Vertical and Horizontal Coordination, Cooperation, Policy Implementation, SEKARDADU

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola koordinasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi berprestasi masuk dalam nominasi prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Program ini merupakan kegiatan yang melibatkan lintas sektor Dinas Pendidikan dengan melibatkan siswa dari semua tingkatan pendidikan, mulai siswa Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, dan pondok pesantren, untuk bersama-sama merawat sungai di sekitar lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam Program Sekardadu ini selain Dinas Pendidikan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pertanian

dan Pangan, serta Dinas Perikanan. Pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif, dimana pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci (key informan) ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu dan informan selanjutnya dilakukan secara snowball. Verifikasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teknik analisis data model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana; 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi pemerintah daerah dalam Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik dan lancar, baik secara vertikal maupun horizontal sehingga memperoleh prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Terjaminnya pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal adalah dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi Bupati dengan struktur di bawahnya dan sebaliknya maupun koordinasi diantara Organisasi Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar, baik secara formal maupun informal, online maupun offline, baik di kantor maupun di lapangan. Jadi, koordinasi vertikal maupun horizontal sebagaimana dikatakan Hasibuan (2011) dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Temuan, pertama lembaga pendidikan masih belum optimal, sehingga partisipasi siswa masih bersifat mobilisasi. Kedua, tidak tersedianya anggaran konsumsi bagi siswa saat melaksanakan program di lapangan.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Koordinasi vertikal dan horizontal, Kerjasama, Pelaksanaan Kebijakan, SEKARDADU

PENDAHULUAN

Kondisi air sungai-sungai di Kabupaten Banyuwangi terancam pencemaran yang berasal dari limbah industri, pertanian dan limbah domestik. Pada sisi lain, banyaknya warga yang masih sering membuang sampah sembrangan di sungai, saluran air, sempadan sungai. Hal tersebut merusak keindahan dan berdampak pada kesehatan yang disebabkan menurunnya kualitas air yang tercemar. Adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya yang buruk ini, mengakibatkan adanya ketidakstabilan atau ketidakseimbangan ekologi seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan dan sebagainya (Rahayu, 2015). Volume sampah di Kabupaten Banyuwangi masih tinggi, yang mencapai 1.245 ton per hari yang sebagian besar sampah anorganik seperti halnya plastik (Dinas Lingkungan Hidup; 2022). Menurut Kompas, potensi sampah yang dihasilkan di Banyuwangi mencapai 37.360,89 ton. Dan satu tahun mencapai 448.330,70 ton. Dari total tersebut komposisi 45 persen berasal dari sampah plastik (Kompas, 4 Agustus 2022). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan akan mengganggu kelestarian sumber daya air di Daerah Aliran Sungai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu). Program ini merupakan program yang melibatkan lintas sektor mulai dari Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta

Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Petanian dan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan dengan melibatkan seluruh sekolah dan Perguruan Tinggi yang kawasannya dilintasi sungai. Program Sekardadu memberikan edukasi pada siswa di sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa Perguruan Tinggi untuk terlibat upaya melestarikan lingkungan dengan selalu menjaga kebersihan sungai. Jumlah satuan pendidikan yang terlibat dalam program ini terdiri 174 SD, 75 SMP, 27 SMA, serta 9 Perguruan Tinggi. Para siswa merawat sambil belajar menjaga ekosistem sungai sekaligus belajar bekerja sama untuk menjaga aliran sungai agar tetap bersih dari sampah. Kegiatan yang dapat dilakukan di stren kali menjadi destinasi wisata, memasang *screenguard* di sungai, membangun kolam ikan di sungai, dan penanaman pohon adalah beberapa program lainnya yang dilaksanakan dalam Program Sekardadu.

Tujuan Program ini bukan hanya untuk menjaga sungai agar tetap bersih, tetapi juga diharapkan dapat mencetak *agent of change* (kader) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya terutama menjaga kelestarian sumber daya air sungai. Komitmen Bupati Banyuwangi dalam Program Sekardadu ini, dibuktikan dengan mengeluarkan Keputusan Bupati No.188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan SK tersebut, Tim Koordinasi terdiri dari 6 Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas PU Pengairan,

Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Perikanan. Pada tahun 2023 program ini melibatkan 174 SD, 75 SMP, 27 SMA, dan sembilan 9 kampus se-Banyuwangi untuk berpartisipasi dalam implementasi program Sekardadu.

Program Sekardadu ini, *Leading* sektornya adalah Dinas PU Pengairan sekaligus berperan sebagai serta koordinator, fasilitator, Pusat informasi, dan Pusat koordinasi pelaksanaan program Sekardadu. Dinas Pendidikan berkontribusi membantu memobilisasi para siswa pada lembaga pendidikan yang tergabung kedalam program Sekardadu. Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada kegiatan bersih-bersih sungai khususnya dalam permasalahan sampah. Dinas PU Cipta Karya berkontribusi menyalurkan bantuan terkait bibit tanaman jika ada kegiatan untuk melakukan penanaman pohon. Dinas Perikanan berkontribusi dalam hal penyediaan bibit ikan jika diadakannya kegiatan penebaran bibit ikan di sungai. Dinas Pertanian dan Pangan juga berkontribusi membantu mensosialisasikan terkait tanaman holtikultura pada saat sosialisasi berlangsung sebagai salah satu kegiatan dalam program Sekardadu.

Keterlibatan berbagai sektor memerlukan *political will* dan komitmen yang kuat dari Bupati sebagai Kepala Daerah. Koordinasi dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal harus dapat berjalan dengan baik, untuk memastikan agar tetap terjaganya persamaan persepsi sekaligus menjaga komunikasi dalam kebersamaan demi

mewujudkan tujuan program Sekardadu yang telah ditetapkan oleh Bupati.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif - deskriptif. Lokus penelitian ini pada Tim Koordinasi Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Sekardadu, yang beranggotakan: Kantor Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilaksanakan Bulan Desember 2023-Februari 2024. Fokus penelitian ini pada Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dan verifikasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi gabungan. Informan ditentukan secara *purposive* (Heryan, 2021) dan Snowball (Sugiyono, 2008). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi

DISKUSI

Kegiatan dalam Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meliputi 4 (empat) prioritas kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 1. Susunan Kegiatan pada Program Sekardadu

No	Bentuk Kegiatan	Aktivitas
1.	Promotif (sosialisasi)	Membuat majalah dinding tentang konservasi sumber daya air, Membuat Poster Ajakan untuk peduli kelestarian sumber daya air, Membuat acara yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pada kelestarian sumber daya air, Melaksanakan kegiatan yang mengedukasi masyarakat untuk peduli kelestarian sumber daya air, dan Fasilitasi Lembaga Pendidikan untuk ikut melaksanakan kegiatan Sekardadu.
2.	Preventif (Pencegahan)	Membuat peraturan tertulis yang bertujuan untuk menjaga pelestarian sumber daya air, Memasukan pembelajaran tentang kepedulian untuk menjaga kelestarian sumber daya air, serta Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk membuat peraturan yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya air.

-
- | | |
|------------------------|--|
| 3. Kuratif (Perbaikan) | Membersihkan sempadan sungai dan saluran yang ada di lingkungan, membersihkan sungai dan saluran yang ada di lingkungan, dan membuat kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki daerah aliran sungai yang rusak, seperti membersihkan sungai, penataan sempadan menjadi Ruang terbuka hijau (RTH) dan sebagainya. |
|------------------------|--|
-
- | | |
|------------------------------|---|
| 4. Rehabilitatif (Perawatan) | Penanaman bibit pohon, sarana – prasarana pendukung untuk menjaga kebersihan sungai dan saluran, Screen barrier di sungai atau saluran di sekitarnya, Membuat vertical garden, serta Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dan dikirimkan ke TPS3R dilingkungannya |
|------------------------------|---|
-

Sumber: data diolah (Peneliti; 2024)

Kabupaten Banyuwangi memiliki sebanyak 390 daerah irigasi (DI), yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mengairi hamparan sawah yang sangat luas sehingga tingkat kesuburan tanah tetap terjaga (Dinas PU Pengairan pada tahun 2022). Pemetaan wilayah dengan zonasi dilakukan agar menjangkau seluruh wilayah target/sasaran dalam pelaksanaan program Sekardadu. Hasil pemetaan wilayah zonasi yang meliputi 281 daerah irigasi (DI) yang berada di beberapa kecamatan adalah 11 zonasi wilayah yang dikelola oleh masing-masing Kordsa (Koordinator Sumber Daya Air). Sedangkan, jangkauan panjang saluran masing-masing satuan pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan adalah: siswa SD memiliki jangkauan sepanjang 34.800 M, SMP 22.500 M, dan SMA 13.500 M.

Keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi, tidak terlepas dari komitmen Bupati yang kuat. Kuatnya komitmen Kepala Daerah diwujudkan dalam pola koordinasi vertikal maupun horizontal yang baik dibarengi dengan adanya kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

1. Koordinasi secara Vertikal

Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi (Awaluddin dalam Hasibuan, 2011). Koordinasi secara vertikal merupakan bentuk dari adanya hubungan yang terjalin antar institusi pemerintahan baik dengan level pemerintahan yang lebih tinggi dengan level di bawahnya maupun sebaliknya. Peran penting yang dimiliki oleh

Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan program Sekardadu ini, adalah inisiasi program Sekardadu yang untuk menjaga ekosistem lingkungan, khususnya kelestarian sumber daya air. Inisiasi tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi.

Komitmen Bupati Banyuwangi tidak berhenti dengan hanya mengeluarkan surat keputusan sebagaimana tersebut di atas, tetapi selalu melakukan koordinasi dengan para pimpinan OPD yang terlibat dalam Tim Koordinasi Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan, baik secara formal maupun informal. Bahkan koordinasi dilakukan dengan media sosial baik WA, FB, Zoom, dan IG. Selain melalui media sosial, Bupati juga melakukan koordinasi dengan 6 (enam) OPD yang terlibat, yakni: Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan) dan juga Lembaga Pendidikan. Adapun Tim Unit Pelaksana Teknis (Kordsa) yang terdiri dari pegawai-pegawai pilihan dari Dinas PU Pengairan selaku *leading* dari program ini.

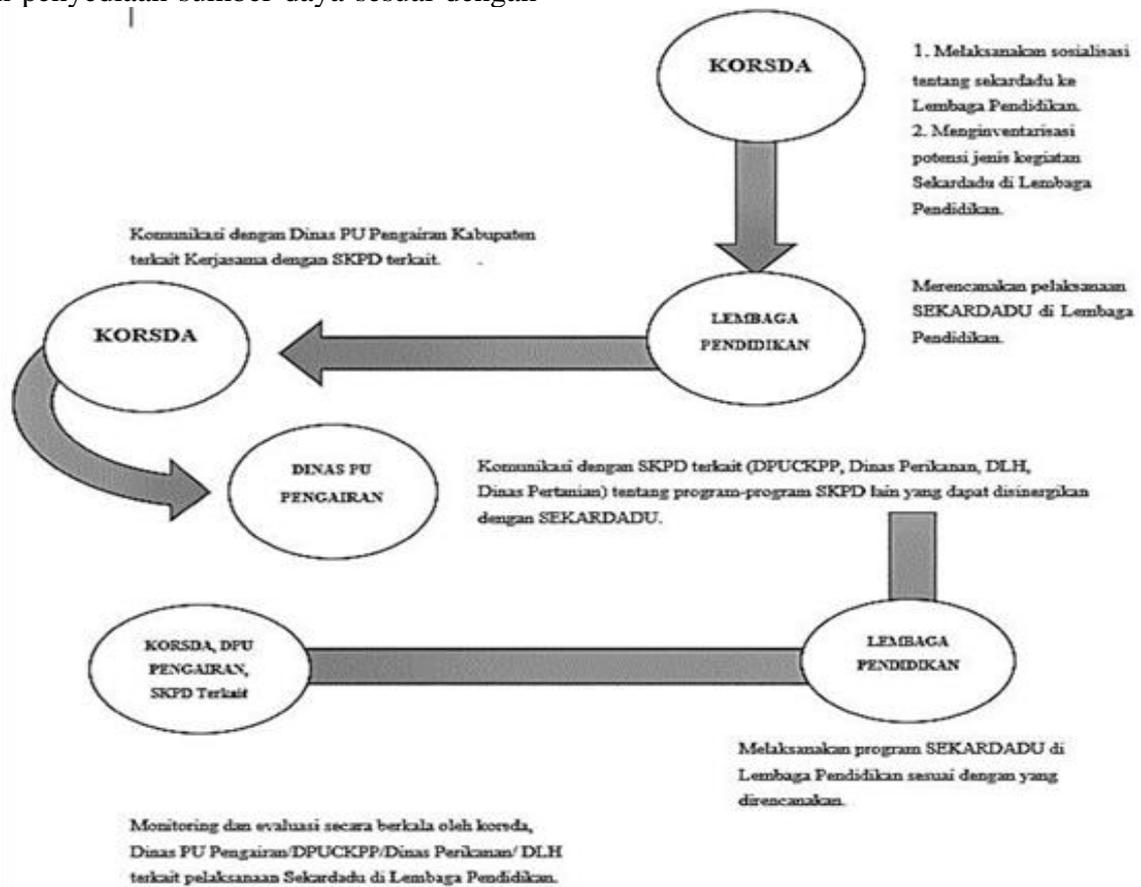
Koordinasi intensif yang dilakukan Bupati dengan OPD yang terlibat, baik dengan satu OPD, beberapa atau bahkan secara bersamaan dalam satu forum koordinasi, memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam menjaga stabilitas kesamaan persepsi dan kekompakan tim. Efek berikutnya semangat semua pihak dapat ditingkatkan, dalam pengarahannya yang baik untuk bahu membahu dalam mewujudkan tujuan program Sekardadu.

2. Koordinasi secara Horizontal

Pelaksanaan program Sekardadu tentu tidak luput dari peran penting yang dijalankan oleh para pejabat publik yang terlibat kerja sama. Pada pelaksanaannya 6 Organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang terlibat berperan penting dalam terlaksananya kegiatan pada program sekardadu ini, 6 OPD tersebut termasuk kedalam implementor dari program Sekardadu dengan Dinas pengairan sebagai *leading* dari program ini. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas pengairan membentuk korsda sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mana anggotanya terdiri dari pegawai pilihan dari Dinas pengairan yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya. Adapula dinas lainnya seperti Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang memberikan bantuan dalam penyediaan sumber daya sesuai dengan

kebutuhan kegiatan. Koordinasi merupakan cara mengkomunikasikan bersama berbagai kegiatan yang berbeda-beda sehingga semua kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga pencapaiannya tidak merusak keberhasilan yang lain (Ndraha, 2011). Sedangkan koordinasi secara horizontal merupakan suatu usaha kerja sama yang terjadi pada pemerintahan dengan tingkatan yang sama.

Koordinasi Horizontal antar OPD dilakukan dalam pencapaian keberhasilan Program Sekardadu melalui peningkatan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama. Selain itu, dalam menjamin terlaksananya koordinasi yang intensif dan terarah, telah disusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk melaksanakan koordinasi horizontal tersebut. Berdasarkan SOP tersebut, alur koordinasi horizontal pada pelaksanaan program Sekardadu sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu (2023)

Alur dalam gambar di atas merupakan pedoman dalam pelaksanaan koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam program Sekardadu. Dimana, Kordsa (Unit Pelaksana teknis) dalam program Sekardadu sebelum pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, selanjutnya melakukan sosialisasi tentang sekardadu ke Lembaga pendidikan dan menginventarisasi (pencatatan, pendataan, dan pelaporan) potensi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di Sungai yang menjadi target. Selanjutnya Kordsa mengkomunikasikannya/berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan serta bekerjasama dengan OPD terkait perencanaan tersebut. Berikutnya Dinas PU Pengairan berkoordinasi dengan OPD-OPD (Dinas yang terlibat lainnya) sekaligus menginventarisir apa saja program-program OPD lain yang dapat disinergikan dengan Sekardadu. Setelah itu, semua implementor yang terlibat melaksanakan program Sekardadu dengan melibatkan siswa-siswa dari Lembaga pendidikan mulai tingkat SD sampai Perguruan Tinggi pada sugai yang menjadi target untuk dibersihkan dari sampah yang mengganggu saluran air dan mengganggu keindahan sesuai dengan yang direncanakan. Pasca pelaksanaan kegiatan, Kordsa, Dinas PU Pengairan, dan OPD lainnya akan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terkait pelaksanaan sekardadu yang melibatkan berbagai tingkatan pendidikan tersebut.

Berkat koordinasi yang jelas, baik koordinasi vertikal maupun Horizontal, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, memberikan dampak yang baik sehingga kondisi sungai dan saluran air di Banyuwangi dapat terjaga. Bahkan dengan kegiatan Sekardadu ini mengantarkan Banyuwangi mendapatkan penghargaan dengan diraihnya prestasi 30 Besar dalam ajang Top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik (kovablik) se-jawa timur tahun 2023.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga dan merawat sungai tersebut, adalah adanya pedoman koordinasi antar OPD yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3 di atas. Selain adanya pedoman

koordinasi yang ditaati oleh semua pihak tersebut, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam program Sekardadu. Berikut beberapa faktor tersebut.

a. Kesatuan Tindakan

Para implementor dalam hal kesatuan tindakan yang baik karena adanya saling percaya diantara mereka pada saat koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan Sekardadu. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu diawali dengan koordinasi diantara para implementor sejak tahap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara transparan. Sehingga pada saat terdeteksi adanya kekurangan maka dapat diatasi dengan antisipasi solusi yang ditawarkan. Lalu ketika terdapat permasalahan atau kendala pada saat pelaksanaan kegiatan para implementor program, secara terbuka dengan implementor lain untuk mencari bantuan serta solusi tanpa menghalangi pelaksanaan kegiatan Sekardadu. Selain itu anggota Tim yang terlibat baik dalam Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan sekardadu memiliki nilai kompetensi yang memadai. Hal ini tercermin dalam Kordsa yang dibantu oleh 6 Dinas yang terlibat sebagai penyedia sumber daya yang kompeten dan saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Sekardadu, di sisi lain para implementor juga melibatkan dinas-dinas atau pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan pada pelaksanaan kegiatan sekardadu selanjutnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan Sekardadu semakin lama semakin baik. Koordinasi yang berjalan dengan baik tersebut didukung oleh adanya saling percaya diantara para implementor.

Persepsi para pelaksana program Sekardadu ini dilaksanakan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, terutama pada aliran sungai yang penuh sampah yang mengganggu saluran air, merusak kualitas air bahkan dapat meyebabkan banjir. Mereka, para implementor menganggap permasalahan sampah menjadi penyebab banyak persoalan terkait dengan pelestarian lingkungan, sehingga dari sudut pandang ini para implementor ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Para implementor menganggap dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Sekardadu tersebut, selain dapat menjaga dan merawat Daerah

Aliran Sungai, juga dapat membangun SDM yang peduli akan Daerah Aliran Sungai dan permasalahan sampah dapat diatasi.

Kegiatan-kegiatan dalam Program Sekardadu dilaksanakan mulai dari kegiatan kerja bakti membersihkan sampah disungai, menanam bibit pohon, penyebaran bibit ikan, pemasangan *screen barrier*, pengelolaan sampah, disertai *game* seru-seruan agar kegiatan tersebut tidak monoton dan memberikan kesan nyaman untuk para peserta yang hadir. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Sekardadu dapat berjalan sesuai dengan target atau sasaran kegiatan.

Terakhir, preferensi atau kecenderungan terhadap suatu objek, yang mana pada preferensi program Sekardadu didasarkan pada SOP pelaksanaan program. Preferensi terhadap korsda (Unit pelaksana teknis) dalam upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program Sekardadu memang sangat dibutuhkan, karena korsda yang bertugas sebagai tim perencana, pengamat dilapangan, memonitoring, dan mengevaluasi semua kegiatan Sekardadu. Dengan demikian peran yang dikerjakan korsda sangat besar sehingga menjadi preferensi terbaik bagi pelaksanaan program Sekardadu ini, namun demikian korsda juga bekerja sama dengan 6 dinas lainnya serta lembaga pendidikan untuk membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan Sekardadu.

b. Komunikasi

Frekuensi komunikasi dalam program sekardadu dari hari ke hari semakin intensif, hal tersebut terlihat pada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh para implementor program ketika ada kegiatan tertentu seperti perencanaan kegiatan, penyusunan kerja sama, dan pembagian tugas implementor. Selanjutnya, hubungan kerja yang terjalin antar para implementor baik secara formal ataupun informal. Komunikasi resmi tercermin dalam forum-forum pertemuan resmi maupun tidak resmi melalui pertemuan langsung maupun via zoom meeting selama proses pengembangan kerja sama. Sedangkan secara informal diwujudkan jika kondisi tidak memungkinkan untuk pertemuan resmi yakni dengan berkomunikasi melalui telepon, WA maupun media lainnya. Pada pola kumulatif (hubungan yang berkembang) antar para

implementor, pada saat pembahasan bersama dalam koordinasi terkait susunan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum disepakati bersama, maupun dalam pelaksanaan kegiatan dan tahap evaluasi pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, masing-masing pihak yang terlibat saling menerima kritik dan saran atas kegiatan yang masuk dalam agenda kerja sama.

Sedangkan pola kumulatif antar implementor program dengan lembaga pendidikan terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program di beberapa bagian, seperti dari perilaku beberapa siswa-siswi yang belum optimal dalam keterlibatannya pada program Sekardadu. Beberapa perilaku siswa-siswi didapati memiliki komitmen yang rendah dalam melaksanakan program Sekardadu, sebab belum adanya pola kumulatif (hubungan yang berkembang) berupa aturan atau SOP tentang monitoring secara berkelanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan terutama terhadap siswa-siswi sebagai pelaku di lapangan setelah selesainya kegiatan. Faktor komunikasi merupakan konsep penting yang mempengaruhi dalam koordinasi, sebagaimana dikatakan Ipan (2021) bahwa komunikasi yang berkelanjutan dengan menunjukkan interaksi (koordinasi) yang teratur antar para implementor (Ipan, 2021).

c. Pembagian Kerja

Kejelasan tugas diantara para implementor dengan dibentuknya Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. dengan kewenangan masing-masing. Dimana Tim Koordinasi terdiri dari 6 Kepala Dinas dan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri para Kepala Bidang di 6 OPD.

Peran penting pejabat publik yakni 6 Organisasi pemerintah daerah yang saling menjalin koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Sekardadu dapat dilihat dimana setiap OPD memiliki program-program yang bisa disinergikan. Beberapa OPD dan peranannya dalam pelaksanaan program Sekardadu sebagai berikut:

Tabel 2. Peran OPD dalam Tim Pelaksana Program Sekardadu

No	OPD	Peran
1.	Korsda (Unit Pelaksana Teknis)	Melaksanakan monitoring & evaluasi secara berkala pada lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Sekardadu.
2.	Dinas Pengairan	Sebagai koordinator, fasilitator, Pusat informasi, dan Pusat koordinasi pelaksanaan program Sekardadu.
3.	Dinas Pendidikan	Membantu memobilisasi lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, dan Universitas yang tergabung kedalam program, Serta membantu Dinas Pengairan jika membutuhkan tenaga pendidik dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
4.	Dinas Cipta Karya	Bersinergi dalam pemanfaatan ruang sumber daya air untuk RTH dan sumber edukasi terkait konservasi sumber daya air dengan pemanfaatan ruang yang tepat. Seperti kontribusi dengan menyalurkan bantuan terkait bibit tanaman jika ada kegiatan untuk melakukan penanaman pohon.
5.	Dinas Lingkungan Hidup	Bersinergi dengan program terkait pengelolaan sampah dan sumber edukasi konservasi sumber daya air melalui pengelolaan sampah yang baik. Seperti kontribusi pada kegiatan bersih-bersih sungai khususnya dalam permasalahan sampah, jika dari Dinas Pengairan membutuhkan bantuan terkait pengelolaan sampah maka dari DLH sendiri akan mengirimkan bantuan tenaga pegawai yang paham terkait permasalahan <u>sampah</u> .
6.	Dinas Pertanian dan pangan	Bersinergi dengan program penanaman bibit dalam pemanfaatan ruang sumber daya air dan sumber edukasi terkait konservasi sumber daya air melalui penanaman tanaman-tanaman pertanian. Seperti kontribusi membantu untuk mensosialisasikan terkait tanaman hortikultura pada saat sosialisasi berlangsung sebagai salah satu kegiatan dalam Sekardadu.
7.	Dinas Perikanan	Bersinergi dengan program Dinas perikanan terkait budidaya perikanan dan sumber edukasi konservasi sumber daya air untuk budidaya perikanan. Seperti kontribusi dalam hal penyediaan bibit ikan jika diadakannya kegiatan penebaran bibit ikan di sungai

Sumber: Buku Panduan Sekardadu (2023)

Pembagian Tugas dalam Program Sekardadu ini dilakukan dengan jelas. Pertama untuk staf atau implementor, dalam kategori ini pada pelaksanaan program memiliki jumlah staf yang relevan dengan kebutuhan kegiatan yakni ada 1 tim teknis (korsda) dan 6 Dinas sebagai tim koordinasi kegiatan Sekardadu yang mana hal tersebut sudah lebih

dari cukup untuk pembagian tugas yang merata. Selain itu, para implementor program juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya, dimulai dengan adanya pembentukan Unit pelaksana teknis (Korsda) yang mana anggota yang tergabung kedalam korsda adalah pegawai-pegawai pilihan yang bekerja di Dinas PU Pengairan

yang memiliki keahlian khusus dibidang teknisi program pada kegiatan Sekardadu. Untuk tim koordinasi kegiatan yang terdiri dari 6 Dinas sendiri dipilih berdasarkan fungsi dan kepentingan pada program Sekardadu, Sehingga dengan kapabilitas tersebut tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

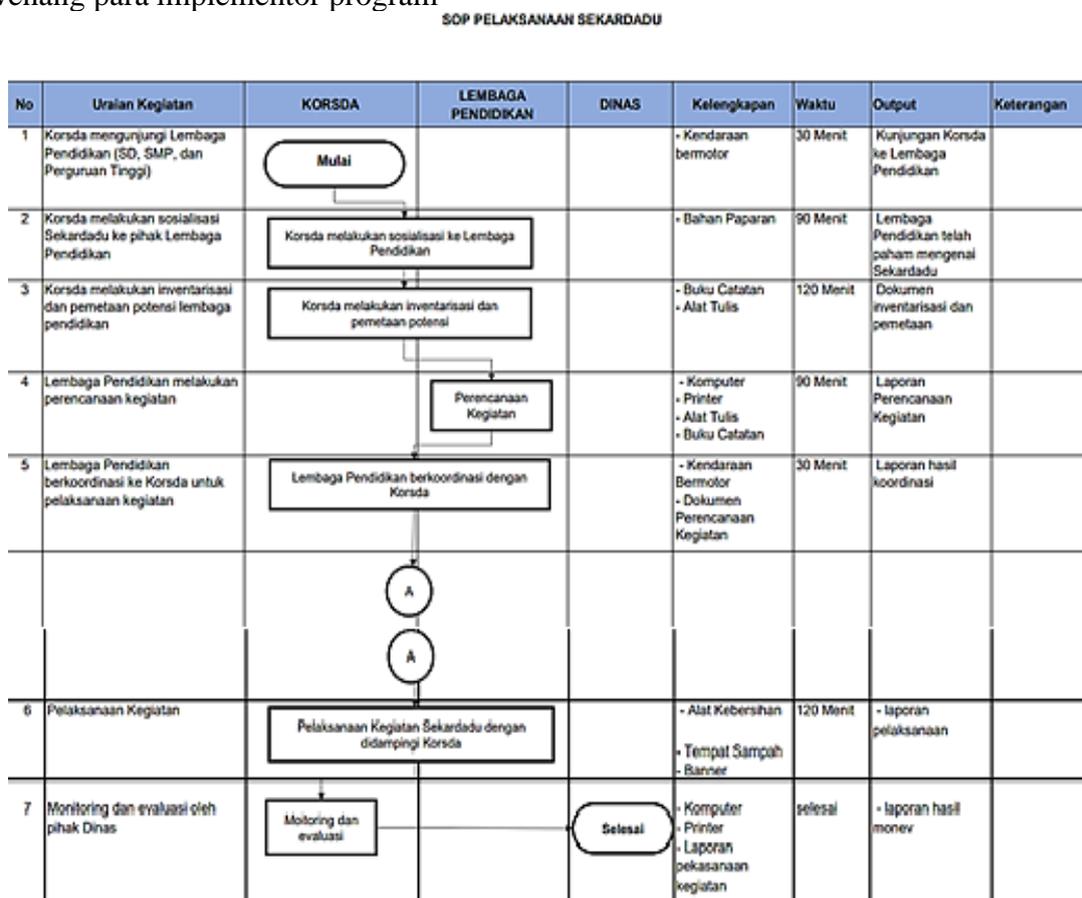
Kedua, informasi. Dalam aspek ini informasi untuk program Sekardadu dapat dilihat secara jelas melalui SOP pelaksanaan Sekardadu sehingga para implementor dapat mengetahui serta memahami secara nyata mengenai *job description* masing-masing implementor.

Ketiga, Kewenangan yang mana dapat dilihat pada Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pada buku panduan Sekardadu juga dijelaskan mengenai wewenang para implementor program

Dinas Pengairan berperan sebagai fasilitator menyediakan beberapa sarana dan prasarana seperti penyediaan barang cetakan dan penggandaan, media cetak atau elektronik untuk keperluan sosialisasi melalui media online maupun melalui media cetak lokal, penerbitan buku panduan Sekardadu, alat tulis, komputer, serta kendaraan untuk perjalanan dinas.

Berkaitan dengan anggaran. Sesuai dengan SK Bupati yang mana anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Sekardadu ini semua dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi sehingga dalam pembagiannya disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Tetapi para implementor program ini terkendala karena tidak ada anggaran khusus terkait pemberian konsumsi untuk peserta pelatihan.

Adapun SOP pada pelaksanaan Sekardadu dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Standart Operating Procedure(SOP) Pelaksanaan Sekardadu

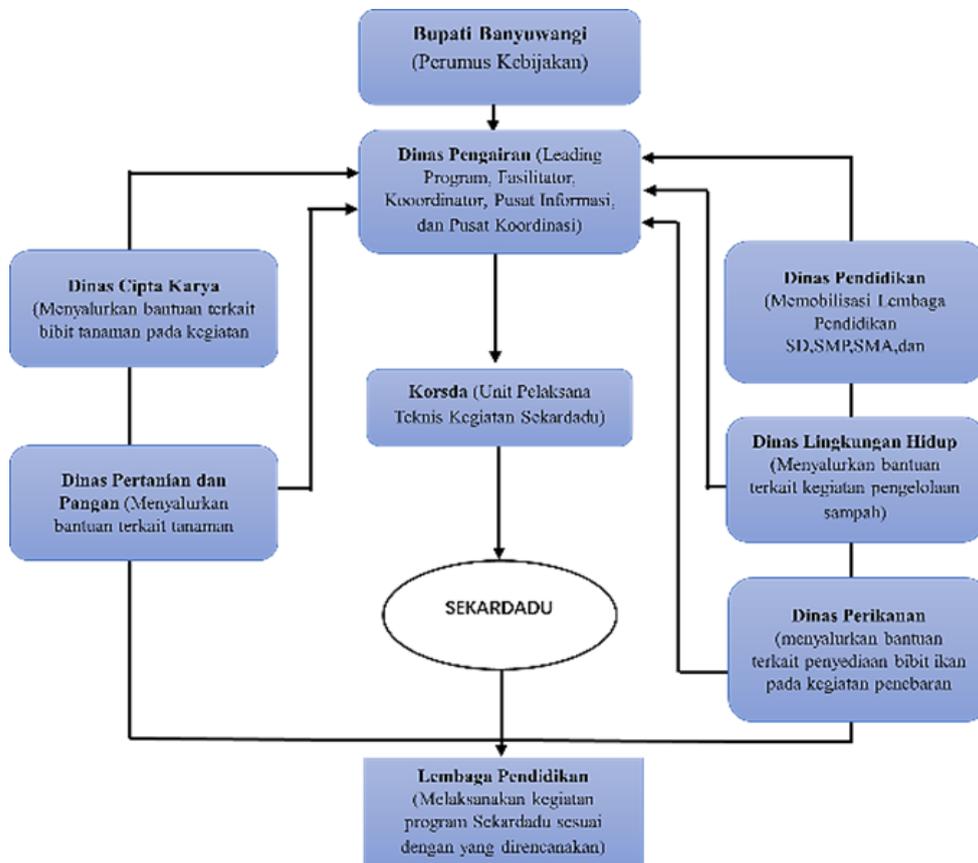
Sumber: Dokumen Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi (2023)

d. Disiplin

Pada faktor ini, aspek perilaku sangat berperan penting dalam pelaksanaan program. Perilaku implementor program dalam pelaksanaan kegiatan Sekardadu ini terwujud dengan baik yang mana dalam menjalankan perannya implementor seperti Kordsa, dan 6 dinas yang terlibat memiliki perasaan yang patuh dan taat pada peraturan serta bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing, Dibuktikan dengan Implementor yang tergabung kedalam program Sekardadu ini dalam melaksanakan kegiatan programnya mengacu pada *Standart Operating Procedure*(SOP) yang dibuat oleh Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Sekardadu. Melalui SOP yang ada para implementor program akan bekerja sesuai dengan alur kegiatan yang telah dijelaskan dalam sistem yang ada dimana Kordsa nantinya sebagai perencana dan memantau semua kegiatan program yang akan dijalankan oleh para implementor (OPD). Mulai dari kelengkapan, waktu, serta Output sudah tertera secara jelas melalui SOP

program Sekardadu. Dengan adanya SOP tersebut, implementor program dapat menjalankan tugas- tugasnya secara transparan sesuai dengan tata cara kerja yang berlaku. Selain itu rasa tanggung jawabnya dibuktikan dengan Dinas Pengairan mengirim dan mengundang para partisipan yang terlibat sebagai bentuk pemberian informasi resmi formal, serta menjamin kesamaan informasi dengan pemahaman diantara semua pihak. Dinas Pengairan juga mengundang pihak lainnya sebagai bentuk partisipan dalam kegiatan Sekardadu yang nantinya akan mensinergikan program Sekardadu dengan program lainnya, sehingga nantinya Sekardadu tidak hanya melibatkan 6 dinas saja, tetapi akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Berikut hasil skema dari Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi baik koordinasi secara vertical maupun horizontal dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Pola Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Dengan pola tersebut pelaksanaan koordinasi berjalan dengan optimal, baik antar implementor program, baik koordinasi vertikal yakni antara Bupati Banyuwangi dengan 6 organisasi pemerintah daerah maupun koordinasi horizontal yakni antar organisasi pemerintah daerah setingkat dalam konsep koordinasi oleh Hasibuan (2011). Bahkan program Sekardadu dapat penghargaan Top 30 kovablik (kompetisi inovasi pelayanan publik) tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN

Pola koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Koordinasi secara Vertikal

Pada koordinasi secara vertikal peran penting dimiliki oleh Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Bupati yang menginisiasi program Sekardadu yang berfokus pada kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Komitmen yang kuat dari Bupati dalam menjaga kelestarian sumber daya air diwujudkan dengan menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi. Dimana, Dinas Pengairan sebagai *leading* dalam pelaksanaan program Sekardadu, dengan melibatkan 6 dinas (Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan), yang bekerja sama dan saling berkoordinasi. Koordinasi dilakukan dengan optimal, baik secara formal maupun informal, *online* maupun *offline*, di Kantor maupun di lapangan, dengan OPD tersebut dan memantau jalannya kegiatan dengan turun langsung ke lapangan.

2. Koordinasi secara Horizontal

Hubungan antar OPD dalam konteks koordinasi secara horizontal terlaksana

antar 6 Organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang terlibat berperan penting dalam program Sekardadu. Koordinasi tersebut termasuk kedalam implementor dari program Sekardadu dengan Dinas pengairan sebagai *leading sector* dalam program ini. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas pengairan membentuk Kordsa sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mana anggotanya terdiri dari pegawai pilihan dari Dinas pengairan yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya dari Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang memberikan bantuan dalam penyediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Koordinasi antar OPD juga dilakukan baik secara formal maupun informal, *online* maupun *offline*, di Kantor maupun di lapangan.

3. Temuan: bahwa pertama, biaya pelaksanaan program Sekardadu dibebankan pada APBD sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, namun tidak ada alokasi konsumsi pada saat pelatihan pada para siswa. Kedua, kesadaran siswa di luar kegiatan Sekardadu masih ada yang berperilaku buruk membuang sampah sembarangan, karena partisipasinya bersifat mobilisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta:CV. Haji Masagung
- Heryan, A.(2021). *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Huberman, M. & S. (2014). *Qualitative data analysis: A methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ipan, dkk. (2021). *"Collaborative*

Governance dalam Penanganan Stunting". *Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 383–391.

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/33/KEP/429.011/2022 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai Di Banyuwangi (Sekardadu) 2022.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Setia. Rahayu 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Pendidikan*, 5.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.